

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.2.1 Belanja Modal**

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah belanja modal pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau aset daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Menurut kementerian keuangan republik Indonesia direktorat jendral anggaran, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dapat digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Aset tetap yang dimiliki daerah adalah sebagai akibat dari belanja modal yang merupakan suatu syarat utama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana anggaran belanja modal dalam APBD. Dalam setiap tahun diadakannya pengadaan aset tetap yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (pemda) sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak dalam jangka panjang secara finansial. Belanja modal yang termaksud dalam aset tetap pemerintah daerah ialah seperti Peralatan, Infrastruktur, Bangunan, dan Harta tetap lainnya. Untuk dapat memperoleh aset tetap tersebut ialah dengan 3 cara seperti: Membangun sendiri, Menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli, Namun yang dilakukan pemerintah ialah dengan cara membeli. Adapun proses yang dilakukannya ialah dengan cara lelang dan tender.

Menurut Halim (2004), belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau aset daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori pertama (Syaiful, 2006):

- a. Belanja Modal ialah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan pembelian dan pembebasan balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b. Belanja Modal Peralatan dan mesin ialah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, penambahan dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta investaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja Modal dan Gedung ialah pengeluaran biaya yang digunakan untuk penambahan/pengadaan, dan termasuk pengeluaran dan perencanaan, pengawasan dan pengelolaan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ialah pengeluaran biaya yang digunakan untuk penambahan/pengadaan, penggantian peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran dan perencanaan, pengawasan dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- e. Belanja Modal Fisik Lainnya ialah pengeluaran /biaya yang digunakan untuk penambahan atau pengadaan dan penggantian pembangunan pembuatan serta

perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini ialah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

**Tabel 2.1**

**Komponen Biaya yang Termasuk ke dalam Belanja Modal**

<b>Jenis Belanja Modal</b>	<b>Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal</b>
Belanja Modal Tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja modal pembebasan tanah</li> <li>b. Belanja modal pembuatan sertifikat tanah</li> <li>c. Belanja modal pembayaran honor tim tanah</li> <li>d. Belanja modal pengukuran tanah</li> <li>e. Belanja modal pengurungan dan pematangan tanah</li> <li>f. Belanja modal perjalanan pengadaan tanah</li> </ul>
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan</li> <li>b. Belanja modal tenaga kerja dan honor pengelola teknis gedung dan bangunan</li> <li>c. Belanja modal perencanaan gedung dan bangunan</li> <li>d. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama gedung dan bangunan</li> <li>e. Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan</li> <li>f. Belanja modal honor perjalanan gedung dan bangunan</li> <li>g. Belanja modal perizinan gedung dan bangunan</li> </ul>

Tabel 2.1

## Komponen Biaya yang Termasuk ke dalam Belanja Modal

Jenis Belanja Modal	Komponen biaya yang dimungkinkan ke dalam Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin.</li> <li>b. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin.</li> <li>c. Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralata dan Mesin.</li> <li>d. Belanja Modal Perizinan Peralatandan Mesin.</li> <li>e. Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin.</li> <li>f. Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin.</li> </ul>
Belanja Modal, Jalan, irigas, Dan jaringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan.</li> <li>b. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jlan dan Jembatan.</li> <li>c. Belanja Modal Perizinan dan Jembatan.</li> <li>d. Belanja Modal dan Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Jalan dan Jembatan.</li> <li>e. Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan.</li> </ul>

Tabel 2.1

**Komponen Biaya yang Termasuk ke dalam Belanja Modal**

<b>Jenis Belanja Modal</b>	<b>Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal</b>
Belanja Modal, jalan irigasi, dan jaringan	f. Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan. g. Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan. h. Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan. i. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor. j. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan. k. Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan. l. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Irigasi dan Jaringan. m. Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan.
Belanja Modal Bahan Fisik Lainnya	a. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Pengelola Teknis Fisik lainnya. b. Belanja Modal Perizinan Fisik lainnya, Belanja Modal Jasa Konsultan Fisik lainnya. c. Belanja Modal Sewa Peralatan Fisik lainnya. d. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Fisik lainnya.

### 2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi dipemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diprioritaskan karena diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional.

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Menurut Halim (2002) pendapatan merupakan semua pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah ialah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.

Sedangkan UU No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah ialah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk di gunakan sebagai modal dasar Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang. Namun perlu diingat bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang: menetapkan Peraturan

Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas pendidikan, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor (UU No 33 Tahun 2004).

Menurut Halim (2017) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan:

#### A. Pajak Daerah

Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame Pajak parker
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahangalian golongan C

#### B. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah ialah pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Menurut Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk Kabupaten/Kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.

#### C. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan ialah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas persyaratan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

- b. Bagian laba atas persyaratan modal pada perusahaan milik Negara/BUMD.
- c. Bagian laba atas persyaratan modal pada perusahaan milik swasta-swasta atau kelompok usaha masyarakat.

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan iniialah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah selain yang disebutkan diatas. Jenis pendapatan ini disebut objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan aset daerah.
- b. Pendapatan bunga.
- c. Jasa giro.
- d. Penerimaan atas tuntutanganti kerugian daerah.
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatanpelaksanaan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda pajak.
- i. Pendapatan denda retribusi.
- j. Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- k. Pendapatan dari pengambilan.
- l. Fasilitas social dan umum.
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Abdullah dan Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerahsecara keseluruhan. Meskipun

proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004).

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar juga kewenangan pemerintah tersebut dalam melakukan kebijakannya. Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat).

### **2.2.3 Hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja modal**

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka berdampak pada periode yang akan datang ialah produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. (Abimanyu, 2005). Peningkatan pemerintah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan untuk meningkatkan kualitas layanan Publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasinya (kontribusi) Publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002).

#### **2.2.4 Jumlah Penduduk**

Penduduk merupakan populasi atau sumber daya manusia yang mendiami atau menduduki suatu wilayah tertentu. Penduduk dewasa ini merupakan subyek pembangunan, meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum di suatu daerah, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, jumlah penduduk menjadi variabel utama dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan.

Pengelompokan data kependudukan berdasarkan karakteristik atau cirri-ciri yang sama dinamakan komposisi penduduk, oleh karena itu, komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk berdasarkan karakteristik yang sama, misalnya komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan.

Umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk yang paling pokok, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin paling sering digunakan dalam berbagai bidang.

Komposisi penduduk menurut umur dikenal dengan istilah struktur penduduk, biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok umur. Setiap kelompok umur pada umumnya memiliki jarak antara umur 5 tahun, misalnya 0-4, 5-9, 10-14,....60-64, 65+. Struktur penduduk tidak sama antara negara yang satu dan negara yang lain, antara daerah perdesaan dan perkotaan, serta antara pulau yang satu dan pulau yang lain. Struktur penduduk ini dipengaruhi oleh tiga faktor demografis, yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan penduduk).

Berdasarkan pengelompokan tersebut diatas, selanjutnya struktur penduduk dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Umur 0-14 tahun dinamakan usia muda (usia belum produktif). Jika suatu wilayah atau negara sebagian besar penduduknya berusia muda, wilayah atau negara tersebut termasuk dalam struktur penduduk muda.
2. Umur 15-64 tahun dinamakan usia dewasa (usia produktif atau usia kerja). Jika suatu wilayah atau negara sebagian besar penduduknya berusia dewasa, wilayah atau negara tersebut termasuk dalam struktur penduduk dewasa.
3. Umur 65 tahun dan lebih dinamakan usia tua (usia tidak produktif). Jika suatu wilayah atau negara sebagian besar penduduknya berusia tua, wilayah atau negara tersebut termasuk dalam struktur penduduk tua.

### **2.2.5 Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Belanja Modal**

Belanja modal yang dilakukan oleh daerah pada dasarnya merupakan untuk kepentingan pelayanan publik, baik berupa sarana dan prasarana yang akan menunjang efektif dan efisiennya pelayanan tersebut. Penduduk yang semakin banyak akan membutuhkan pelayanan yang semakin banyak pula dibandingkan dengan daerah yang jumlah penduduknya lebih kecil.

### **2.2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka satu tahun. Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu dapat digunakan 3 perhitungan. Tiga cara perhitungan tersebut adalah sebagai berikut (Sadono Sukirno, 2011):

- 1) Cara Produksi (Produk Neto)

Dengan pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Penggunaan ini mempunyai dua tujuan, yaitu (a) untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor ekonomi didalam mewujudkan pendapatan nasional, (b) sebagai salah satu cara untuk menghindari perhitungan dua kali yaitu dengan menghitung nilai produksi neto yang diwujudkan pada berbagai tahapan proses produksi.

## 2) Cara Pengeluaran

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran/perbelanjaan keatas barang-barang dan jasa yang diproduksi didalam Negara tersebut. Penghitungan dengan pengeluaran akan dapat memberikan cerminan tentang (a) sampai dimana buruk masalah ekonomi yang di hadapai atau sampai mana baiknya tingkat pertumbuhan yang di capai dan tingkat kemakmuran yang dinikmati, dan (b) memberikan informasi data yang di butuhkan dalam analisis makro ekonomi sehingga dapat di gunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah masalah ekonomi yang sedang di hadapi.

## 3) Cara Pendapatan

Dalam perhitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. Dari perhitungan PDRB dapat di peroleh nilai PDRB. Semakin besar PDRB maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana kejadian kenaikan PDRB. Semakin

tinggi nilai kenaikan PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan suatu hubungan fungsional karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Semakin menambahnya penerimaan pemerintah mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka dapat mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pangutan lainnya.

Menurut Prof. Simon Kuznet (1871) mendefinisikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi merupakan kenaikan dalam kurun waktu yang lama (jangka panjang) untuk menyediakan sebagai jenis barang perekonomian yang selalu meningkat di masyarakat. Kemampuan ini dapat tumbuh berdasarkan kemajuan teknologi, institusional dan idiologis yang diperlukannya. Definisi tersebut memiliki 3 komponen yaitu: a) pertumbuhan ekonomi dalam bangsa dapat dilihat dari meningkatnya persediaan barang secara terus-menerus. b) teknologi yang maju merupakan faktor pertumbuhan ekonomi yang mampu menaikkan derajat pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan aneka macam barang kepada masyarakat. c) penggunaan teknologi yang secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat dan baik (Suryana, 2000 dalam Julianto, 2016).

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang berlaku diberbagai Negara dapat dijelaskan bahwa yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu Negara yaitu: kekayaan sumber daya alam dan tanahnya, jumlah dan

tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem social dan sikap masyarakat.

## 1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

### a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith,

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor ekonomi adalah pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 1999 dalam Julianto, 2016). Unsur pokok yang terdapat didalam sistem produksi suatu Negara ada 3 (tiga): *Pertama*, Sumber daya alam yang tersedia merupakan suatu wadah yang didasari dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumberdaya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. *Kedua*, sumberdaya manusia merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja. *Ketiga*, stok modal adalah unsur produksi dalam menentukan tingkat pertumbuhan output. Kapital atau modal diartikan sebagai mesin, pabrik, dan peralatan produksi semakin banyak mesin tentu bisa dihasilkan produk semakin banyak pula.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor prduknya. Produktivitas ditingkatkan dengan sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi (Sukirno, 1994 dalam Ahmad, 2015). Persamaannya sebagai berikut:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Dimana

$\Delta Y$  = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

$\Delta K$  = Tingkat Pertumbuhan Barang Modal

$\Delta L$  = Tingkat Pertumbuhan Tenaga Kerja

$\Delta T$  = Tingkat Pertumbuhan Teknologi

b. Pertumbuhan Ekonomi Menurut David Ricardo

Menurut Ricardo, pertumbuhan ekonomi tidak berbeda yang dikemukakan oleh Smith. Maka secara garis besar pertumbuhan ekonomi di tarik oleh Ricardo berkaitan dengan Smith ialah berkaitan dengan kesimpulan bahwa perpacuan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi dan dapat dimenagkan oleh pertumbuhan penduduk, dan dalam jangka panjang maka perekonomian mencapai pada keadaan yang stasioner.

Ricardo mengasumsikan bahwa dalam jangka panjang jumlah penduduk yang konstan (tidak berkembang). Karena pada dasarnya output sangat bergantung dengan jumlah penduduk maka dapat diberikan dalam jangka panjang output nasional cenderung konstan (tidak berkembang) sehingga pendapatan perkapita yang konstan. Sebagaimana tingkat upah yang konstan pada tingkat upah alamiah, dan pertumbuhan penduduk konstan, sehingga kaum kapitalis produksi juga konstan pada tingkat yang minimal, akumulasi berhenti (Statonary State).

c. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Robert Malthus

Menurut Malthus menjelaskan bahwa penduduk mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan penduduk meningkat secara deret ukur dan penambahan bahan makanan meningkat secara deret hitung. Namun Ricardo dan Malthus berbeda keyakinan atau pendapat dengan Adam Smith yang belum menyadari hukum hasil yang berkurang, dimana perkembangan penduduk dapat mendorong suatu pembangunan ekonomi apabila mampu

memperluas pasar. Sedangkan Ricardo dan Malthus, perkembangan penduduk secara cepat dapat meningkatkan jumlah menjadi dua kali lipat dalam satu generasi sehingga dapat menurunkan kembali tingkat pembangunan ke taraf yang lebih rendah. Maka pada tingkat ini pekerja dapat menerima upah yang minim atau rendah. (Sukirno, 2010 dalam Julianto, 2016).

## 2. Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Dalam analisis Neo-Klasik, permintaan masyarakat tidak menentukan laju pertumbuhan. Dengan demikian menurut teori Neo Klasik, sampai dimana perekonomian dapat berkembang, tergantung kepada penambahan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi (Jhingan, 2004:265). Ahli ekonomi yang menjadi perintis mengembangkan teori tersebut diantaranya:

### a. Model Pertumbuhan Neoklasik

Menganalisis pengaruh pinjaman internasional dalam pertumbuhan Neoklasik yang dikembangkan oleh Robert Solow (1924). Dalam bentuk yang paling sederhana, model ini menunjukkan bahwa output selalu pada tingkat *full employment* yang ditentukan oleh fungsi produksi Cobb Douglas sebagai berikut.

$$Y = \beta K^a L^{1-a} \text{ atau } Y = \beta K^a$$

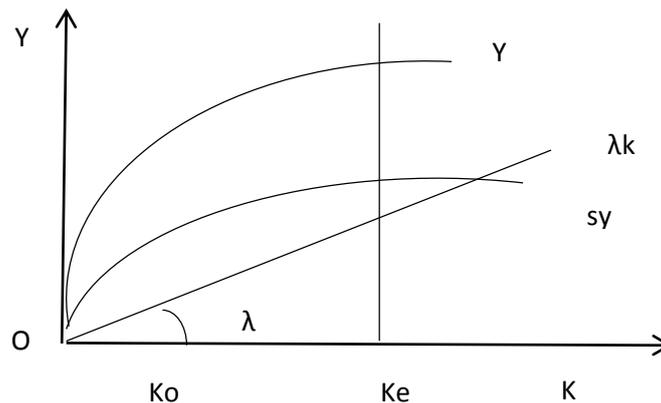
$y = Y/L$  dan  $k = K/L$  adalah setor pendapatan dan  $k$  adalah modal perkapita. Tabungan diasumsikan sebagai proporsional terhadap pendapatan  $S = sY$ , dan tenaga kerja diasumsikan berkembang pada tingkat proporsi yang konstan, maka \*);

$$K^{\wedge} = K^*/K - L^*/L = Sy/K - \lambda = sy/k - \lambda$$

Dengan mengganti persamaan dalam logaritma derivasi waktu akan dihasilkan persamaan sebagai berikut.

$$\dot{y} = \dot{ak} = a (s_y/k - \lambda)$$

perluas model ini dengan memasukkan faktor kemajuan teknologi atau deprensiasisebagai faktor eksogen akan semakin memperjelas.



Gambar 2.1 Kurva neoklasik

\*) Tanda (^) digunakan untuk menjabarkan proporsi tingkat pertumbuhan:

$$\begin{aligned} K^{\wedge} &= (L/K)(\dot{K}) = d(\ln k)dt = (L/K) \{ d(K/L) dt \} \\ &= K^*/K - L^*/L = K^{\wedge} - L^{\wedge} \end{aligned}$$

Menggambarkan di mana suatu perkapita ditunjukkan pada sumbu (poros) horizontal, sedangkan *output* per kapita ditunjukkan pada sumbu vertikal.

a) Teori J.E. Meade

Profesor J.E. Meade dari Universitas Cambridge membangun suatu model pertumbuhan ekonomi neo-klasik yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana bentuk paling sederhana dari sistem ekonomi klasik dapat berperilaku selama proses pertumbuhan ekuilibrium.

b) Teori Solow

Menurut Solow, keseimbangan yang peka antara  $G_w$  dan  $G_n$  tersebut timbul dari asumsi pokok mengenai proporsi produksi yang dianggap tetap,

suatu keadaan yang memungkinkan untuk mengganti buruh dengan modal. Jika asumsi itu dilepaskan, keseimbangan tajam antara  $G_w$  dan  $G_n$  juga lenyap bersamanya. Oleh karena itu Solow membangun model pertumbuhan jangka panjang tanpa asumsi proporsi produksi yang tetap.

Dengan asumsi tersebut, Solow menunjukkan dalam modelnya bahwa dengan koefisien teknik yang bersifat variabel, rasio modal buruh akan cenderung menyesuaikan dirinya, dalam perjalanan waktu, ke arah rasio keseimbangan.

Untuk mengetahui maju tidaknya suatu perekonomian diperlukan adanya suatu alat pengukur yang tepat. Alat pengukur pertumbuhan perekonomian ada beberapa macam diantaranya:

1) Produk Domestik Bruto (PDB)

Produksi Domestik Bruto merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

2) Produk Domestik Bruto per Kapita (Pendapatan per Kapita)

Produk Domestik Bruto per Kapita merupakan jumlah PDB nasional dibagi dengan jumlah penduduk atau dapat disebut sebagai PDB rata-rata atau PDB per kepala.

3) Pendapatan per Jam Kerja

Pendapatan per Jam Kerja merupakan upah atau pendapatan yang dihasilkan per jam kerja. Biasanya suatu negara yang mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja lebih tinggi daripada di negara lain, boleh dikatakan negara bersangkutan lebih maju daripada negara yang satunya.

Beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi di atas dipilih oleh suatu negara dengan keadaan ekonomi di negara tersebut. Peningkatan atau penurunan GDP ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu tenaga kerja, kapital, sumberdaya alam dan lingkungan, teknologi dan faktor sosial.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dapat di ikhtisarkan sebagai berikut

**Tabel 2.1**

<b>Penelitian Terdahulu</b>			
No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1	Bagus Setya Budi (2010)	Belanja Modal. Dana Alokasi Umum. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Luas Wilayah. Jumlah Penduduk. Pertumbuhan Ekonomi.	Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Luas Wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan
2	Ardyan Wahyu Shandika, dan Mulyo Hendro ( <i>Journal of economics</i> Vol. 1 No. 1 2012)	Pertumbuhan Ekonomi. Tenaga Kerjayang Bekerja. Jumlah Penduduk. Aglomerasi. Modal.	Tenaga Kerjayang Bekerja berpengaruh psitif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jumlah Penduduk berpengaruh psitif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Aglomerasi dan Modal berpengaruh psitif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu (sambungan)**

3	Ida Ayu Paramitha Astuti' dan Ida Bagus Putra Astika' ( <i>jurnal Economics</i> Vol.17.3. 2016)	Kesejahteraan Masyarakat. Jumlah Penduduk. Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Khusus.	Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
4	Dwi Puspita Ambar Sari (2007)	Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi Umum. Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Perkapita.	DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Perkapita berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5	Akbar Abdul Gafar (2010)	Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum.	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan kesejahteraan masyarakat. PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan kesejahteraan masyarakat. DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu (sambungan)**

6	Maimunah (2006)	Belanja Daerah. Flypaper Effect. Dana Alokasi Umum. Pendapatan Asli Daerah.	Flypaper Effect berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. DAU berpengaruh Signifikan Terhadap belanja daerah. PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
7	Anis Setiawati (2007)	Pertumbuhan Ekonomi. Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Khusus. Belanja Pembangunan.	DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja Pembangunan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
8	Nurindah Rahmawati (2010)	Alokasi Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum.	PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung. PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja tidak langsung. DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung. DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja tidak langsung

## 2.3 Penurunan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh PAD terhadap belanja modal

Penelitian Sumarmi (2010) menyatakan terdapat pengaruh positif dari PAD terhadap belanja modal. Namun dari penelitian yang dilakukan Nurisa (2013) menyatakan bahwa PAD secara persial berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Dalam penelitian Yovita (2011) berpendapat bahwa provinsi dengan PAD yang besar cenderung tidak memerikan belanja modal yang besar. Wardira (2013) mengatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Maka dapat di artikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran yang dilakukan pemerintah atas belanja modal akan semakin tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan pada penelitian yang dilakukan oleh rahmawati (2010) tentang

“pengaruh PAD dan DAU terhadap Alokasi Belanja Daerah” yang mengatakan bahwa Pad berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Lilik Khoirul Mala dan Dwi Asti Septiana (2008) dalam Rahmawati (2010) dan Wahyu Mansur (2011) yang menemukan secara Parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan pemahaman bahwa belanja langsung juga akan menurun karena belanja modal merupakan dari belanja langsung.

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber keuangan local, khususnya melalui PAD (sidik, 2002). PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang di miliki oleh pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (tambunan, 2006). Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif belanja modal.

### **2.3.2 Pengaruh Jumlah Penduduk (JP) terhadap Belanja Modal**

Penduduk merupakan populasi atau sumber daya manusia yang mendiami atau menduduki suatu wilayah tertentu. Penduduk dewasa ini merupakan subyek pembangunan, meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum di suatu daerah, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, jumlah penduduk menjadi variabel utama dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan.

Pengelompokan data kependudukan berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri yang sama dinamakan komposisi penduduk, oleh karena itu, komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk berdasarkan karakteristik yang sama, misalnya komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan. Umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk yang paling pokok, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin paling sering digunakan dalam berbagai bidang.

Komposisi penduduk menurut umur dikenal dengan istilah struktur penduduk, biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok umur. Setiap kelompok umur pada umumnya memiliki jarak antara umur 5 tahun, misalnya 0-4, 5-9, 10-14,....60-64, 65+. Struktur penduduk tidak sama antara negara yang satu dan negara yang lain, antara daerah perdesaan dan perkotaan, serta antara pulau yang satu dan pulau yang lain. Struktur penduduk ini dipengaruhi oleh tiga faktor demografis, yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan penduduk).

Hipotesis 2 : Jumlah Penduduk (JP) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

### **2.3.3 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Modal**

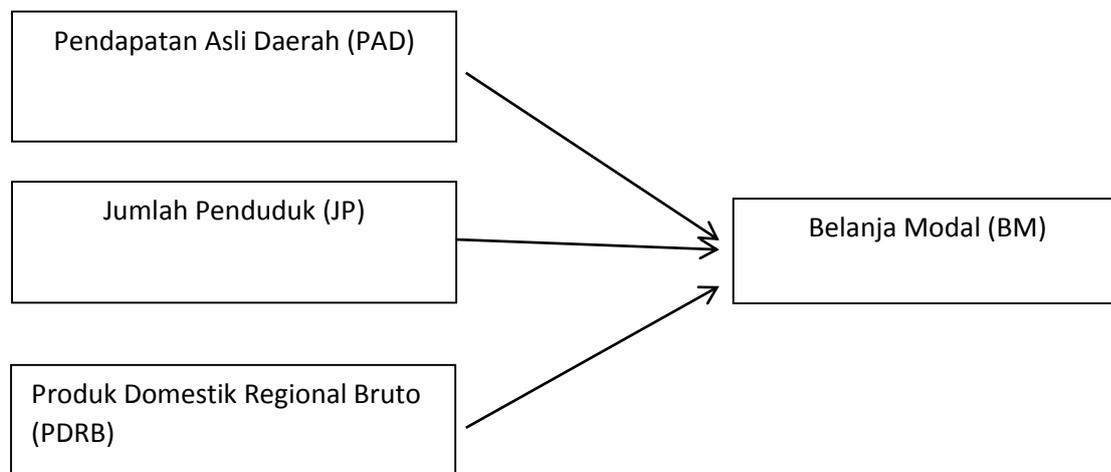
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan PDRB. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan. Darwanto (2007) mengatakan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi pembangunan. Faktor-faktor tersebut antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi, sektor industry, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran dan dukungan pembangunan.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang mendorong terciptanya suatu pertumbuhan ekonomi daerah. Dimana suatu pertumbuhan ekonomi memiliki masing-masing

daerah yang berbeda-beda sesuai dengan potensi daerah tersebut. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan pemerintah akan semakin leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal oleh karena itu, untuk hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut:

Hipotesis 3 : Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

#### 2.4 Model Penelitian



**Gambar 2.2 :**

Kerangka Pemikiran